

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- LIPI, *Papua Road Map* (Jakarta: Serpico, 2009).
- Yusra Habib Abdul Ghani, *Self Government: Studi Perbandingan Tentang Desain Administrasi Negara* (Jakarta: Paramedia Press, 2009).
- Adriana Elisabeth, *Mozaik Cendrawasih, Pembangunan dan Kesejahteraan di Tanah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pelaksanaan Evaluasi Otsus Papua dan Papua Barat Kinerja Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Tahun 2013*.
- Hakim Lukman, *Kedudukan Hukum Komisi negara Di Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
-, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: The Biografy Institute, 2007).
-, *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2020).
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Ni'Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2015).
-, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Sumarsono, *Penataan Daerah dan Desentralisasi Asimetris*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2017).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999).
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).
- Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Depok: Kanisius, 2020).
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si dan Ai Wati, S.Si, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

- Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- H. Utang Rodsidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Yusron, *Beragam Praktek Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*, (Bandung: Refika Ditama, 2013).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I Kekuasaan Pemerintahan Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
-, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku I, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
-, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Jilid II, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001).
-, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000).
-, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, (Jakarta: UNSIKA, 1993).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).
- Stepanus Malak, *Otonomi Khusus Papua*, (Bandung: Ar Raafi, 2012)
- Socrates Yoman, *Pintu Menuju Papua Merdeka, Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan PEPERA 1969 Hanya Sandiwara Politik Amerika, Indonesia, Belanda, dan PBB*.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010).
-, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- J.P Solossa, *Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006).
- Agus Sumule, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Hakim Lukman, *Kedudukan Hukum Komisi negara Di Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2010).

- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Harold J.Laski, *The State in Theory and Practice*, (New York: The Viking Press,1947).
- S.Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 – Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- H. Inu Kencana Syafii dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: FHUI dan Sinar Bakti, 2018).
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Abdul Khaliq, Azhari, Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2019).
- Saldi Isra, *Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).

B. Jurnal, Risalah dan Naskah Akademik:

- Usman Hamid, *Siklus Kekerasan, Korupsi, dan Ketidakpastian Papua Pasca-Soeharto*, Jurnal Prisma Vol.36 No.3 (Depok, LP3ES, 2016).
- Adriana Elisabeth, *Dimensi Internasional Kasus Papua*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 3 No.1, 2006, Papua Menggugat, (Jakarta: LIPI Press, 2006).
- Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).
- Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Transparansi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Risalah Rapat Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan Panitia Khusus atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Rapat Paripurna*, (Jakarta: Bidang Arsip dan Museum DPR-RI, 2001).
-, *Risalah Rapat tentang Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi Usul Inisiatif DPR RI*, (Jakarta: Sekretariat DPR RI, 2001).

....., *Risalah Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Undang – Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya/Papua Dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bidang Arsip dan Museum DPR-RI, 2001).

....., *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU Ke-1), Tentang RUU Otsus Irian Jaya/Papua*, (Jakarta: Bidang Arsip dan Museum DPR-RI).

....., *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU Ke-2), Tentang RUU Otsus Irian Jaya/Papua*, (Jakarta : Bidang Arsip dan Museum DPR-RI, 2001).

....., *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU Ke-3), Tentang RUU Otsus Irian Jaya/Papua*, (Jakarta : Bidang Arsip dan Museum DPR-RI, 2001).

....., *Rapat Paripurna Terbuka ke 16, Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, (Jakarta : Bidang Arsip dan Museum, 2001).

Directory Majelis Rakyat Papua (Papua, Kesbangpol, 2016).

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 64 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

Peraturan Daerah Khusus No.3 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua.

Peraturan Daerah Khusus No.4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota Majelis Rakyat Papua.

C. Daftar Internet:

<https://kbbi.web.id/kedudukan>.

<https://intra.lipi.go.id/public/uploads/publikasi/2019/1574859946.pdf>.

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ec58a82bdd385761ab3aa14c28cb3ec3.pdf>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20789/1/T1_352015602_BAB%20I.pdf.

<http://mrp.papua.go.id/sejarah-hadirnya-mrp/>.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/405>

<https://kbbi.web.id/majelis>.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/201b1a0b9257bc5a1584853b7810bf1b.pdf.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/352>.

<https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/>.

<https://fin.co.id/read/89038/apa-istimewanya-ikn-nusantara-ternyata-beda-dengan-aceh-jakarta-dan-yogyakarta-lho/15>.

